



LAPORAN DELEGASI

KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA SIDANG SOUTH EAST ASIA PARLIAMENTARIANS AGAINTS CORRUPTION (SEAPAC) INFORMATION WEBINAR

The United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) 2021:
What Roles are There for Parliamentarians

Bogor, Jawa Barat
9 Februari 2021



The House of Representatives of
the Republic of Indonesia

WEBINAR SEAPAC 2021

Bogor, West Java - Tuesday, 9th February 2021

SEA PAC

Southeast Asia Parliamentarians
Against Corruption



The UN General Assembly Special Session Against Corruption
(UNGASS) 2021: What roles are there for parliamentarians?

**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SOUTH EAST ASIA PARLIAMENTARIANS AGAINST CORRUPTION (SEAPAC)

INFORMATION WEBINAR

“The UNGASS 2021: What roles are there for Parliamentarians?”

Bogor, Jawa Barat

9 Februari 2021

I. PENDAHULUAN

A. DASAR PENGIRIMAN DELEGASI

Pelaksanaan SEAPAC *Information Webinar* pada tanggal 9 Februari 2021 di Bogor, Jawa Barat didasarkan pada Keputusan Rapat Pimpinan BKSAP DPR RI tanggal 11 Januari 2021.

B. SUSUNAN DELEGASI

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Dr. Fadli Zon, S.S. M.Sc.	F. P.Gerindra/ A-086	Ketua BKSAP
2.	Putu Supadma Rudana	F. P. Demokrat/ A-563	Wakil Ketua BKSAP
3.	Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng.	F. PKS/ A-422	Wakil Ketua BKSAP

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
4.	Ir.H. A.Hafisz Tohir	F. PAN/ A-487	Wakil Ketua BKSAP
5.	Gilang Dhielafararez	F. PDI P/ A-179	Anggota BKSAP
6.	Yohanis Fransiskus Lema S.IP.,M.Si	F. PDI P/ A-239	Anggota BKSAP
7.	H.Nasyirul Falah Amru,SE	F. PDI P/ A-223	Anggota BKSAP
8.	Drs. H. Darul Siska	F. P. Golkar/ A-271	Anggota BKSAP
9.	Adrian Jopie Paruntu	F. P. Golkar/ A-339	Anggota BKSAP
10.	Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos, M.Si.	F. P. Gerindra/ A-078	Anggota BKSAP
11.	Fadhlullah, S.E.	F. P. Gerindra/ A-059	Anggota BKSAP
12.	Muslim, SHI, MM	F. P. Demokrat/ A-523	Anggota BKSAP
13.	Dr.Ir.Hj. Andi Yuliani Paris,M.Sc	F. PAN/ A-517	Anggota BKSAP
14.	Syaikhul Islam, Lc, M.Sosio	F. PKB/ A-031	Anggota BKSAP
15.	H. Syahrul Aidi Ma'azat, L.C., M.A .	F. PKS/ A-418	Anggota BKSAP
16.	Muhammad Iqbal, SE, M. Com.	F. PPP/ A-461	Anggota BKSAP
17.	Hasbi Anshory, S.E.,M.M.	F. P. Nasdem/ A-355	Anggota BKSAP

C. VISI DELEGASI

- Mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang agenda pemberantasan korupsi, terutama di kawasan Asia Tenggara yang berkaitan juga dengan agenda internasional yang diangkat pada sesi United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) pada tahun ini.

- Pemberantasan korupsi merupakan agenda penting yang harus menjadi perhatian para anggota parlemen sebagai pemegang mandat untuk mengawasi, mengawal, maupun merancang penggunaan anggaran negara.
- Bertukar pengalaman maupun praktik cerdas (*Best Practices*) dengan berbagai pemangku kepentingan di kawasan Asia Tenggara, seperti ASEAN-Parties Against Corruption (ASEAN-PAC), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), maupun para anggota parlemen.
- Mengeksplorasi peluang pengadopsian resolusi terkait penguatan peran parlemen dalam upaya pemberantasan korupsi dalam konteks Asia Tenggara.

D. MISI DELEGASI

- Mendorong penguatan peran anti-korupsi parlemen dalam konteks agenda tahunan Majelis Umum PBB dan kondisi negara-negara Asia Tenggara, dengan DPR RI sebagai *leading role-nya*.
- Menghimpun masukan dan materi yang relevan untuk penguatan peran parlemen dalam upaya pemberantasan korupsi

E. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Materi yang dijadikan referensi bagi Delegasi dan Ketua BKSAP DPR RI diolah oleh South East Asia Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC), Tenaga Ahli dan Sekretariat KSI BKSAP berupa TOR, Agenda Pertemuan, Pidato dan Saran Butir Wicara.

II. ISI LAPORAN

A. AGENDA KUNJUNGAN KERJA

10.00 – 10.30	Rapat Komite Eksekutif SEAPAC (Khusus anggota Eksekutif Komite)
10.30 - 11.00	Agenda Pembukaan Kata Sambutan oleh: <ul style="list-style-type: none"> • H.E. Ahmad Bin Abdulla bin Zaid Al-Mahmoud MP, Ketua Global Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), Ketua Qatar Shura Council • Hon. Dr. Fadli Zon MP, Presiden SEAPAC.

	<ul style="list-style-type: none"> • H.E. Dr. (H.C.) Puan Maharani
11.00 - 12.30	<p>Diskusi (<i>Video singkat tentang SEAPAC ditayangkan</i>)</p> <p>Moderator: Bapak Mardani Ali Sera MP, Sekretaris SEAPAC.</p> <p>Pembicara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Francesco Checchi, Penasehat Regional Anti-Korupsi UNODC (Menyiapkan Agenda untuk 2021 UNGASS) • Hajah Suhana binti Haji Sudin Lembaga Anti-Korupsi Brunei, Perwakilan ASEAN Parties against Corruption (<i>Situasi Korupsi di Asia Tenggara dan Fokus UNGASS 2021</i>) • Mochamad Hadiyana, Deputy Bidang Data dan Informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) <p>Pembahas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GOPAC Malaysia, Hon. Mr. Datuk Haji Hasanuddin Bin Mohd Yunus, Anggota Parlemen Malaysia • GOPAC Kamboja, H.E. Mr. Ouk Darmry, Anggota Komisi Anti-Korupsi dan Investigasi, Dewan Nasional Kerajaan Kamboja • GOPAC Timor Leste, Mr. Joao Andre Avelin Correa <p>Sesi Tanya Jawab</p>
12.30 - 12.40	<p>Pidato Penutup Dr. Fadli Zon MP, Ketua SEAPAC.</p>

B. SITUASI UMUM

1. SESI PEMBUKAAN

H.E. Mr. Ahmed bin Abdullah bin Zaid Al Mahmoud, GOPAC and Speaker of Qatar Shura Council (*Video Message*)

GOPAC Chair merasa terhormat dapat menyampaikan sambutan pembukaan dalam *Information Webinar* bertajuk “*The UNGASS 2021: what roles are there for*

parliamentarians?” Ia juga mengaku bahagia karena sejumlah cabang regional GOPAC sangat aktif termasuk SEAPAC. GOPAC Chair menyampaikan terima kasih kepada Presiden SEAPAC, Dr. Fadli Zon dan jajaran eksekutif serta sekretariat atas penyelenggaraan acara tersebut.



H.E. Mr. Ahmed bin Abdullah bin Zaid Al Mahmoud,
GOPAC Chair and Speaker of Qatar Shura Council

Ia menyampaikan tahun ini merupakan kesempatan bagi GOPAC untuk terlibat lebih jauh di PBB melalui UNGASS. Pasca terpilihnya sebagai GOPAC Chair, Mr. Ahmed memiliki misi untuk memperluas dan meningkatkan visibilitas GOPAC sejajar dengan organisasi internasional lainnya. Sejumlah agenda telah disiapkan, termasuk membangun kemitraan dengan IPU maupun PBB, bertemu dan berdialog dengan Sekjen PBB untuk kolaborasi lebih jauh. Kantor Sekretariat Doha juga telah disiapkan, meskipun saat ini masih terhalang pandemi.

GOPAC terangnya, telah terlibat dalam persiapan UNGASS, dalam statusnya sebagai organisasi antar-anggota parlemen dengan Status Konsultatif ke UN ECOSOC. GOPAC telah menyampaikan kontribusi tertulis parlemen dalam persiapan UNGASS. Namun peran tersebut tidak hanya berhenti di situ.

GOPAC Chair menerangkan para anggota parlemen memiliki tanggung jawab melindungi generasi masa depan dan memudahkan mereka hidup adil dan makmur. Selain itu, GOPAC dan SEAPAC memiliki kekuatan untuk mengarahkan lanskap nasional dan internasional melawan korupsi. Ia mengimbau anggota parlemen untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya demi nilai-nilai GOPAC. Mengembangkan wilayah yang belum dipetakan dalam rezim anti-korupsi internasional. Menyuarakan perubahan yang lebih baik untuk komunitas internasional kita dalam melawan korupsi. GOPAC siap mendukung cabang regional termasuk SEAPAC dalam melaksanakan aktivitasnya.

Dr. Fadli Zon , SEAPAC President, Ketua BKSAP

Presiden SEAPAC menyampaikan permohonan maaf mengingat pada tahun 2020 banyak aktivitas tertunda karena pandemi. Namun, meski situasi tahun ini belum juga pasti, SEAPAC harus aktif beraktivitas. SEAPAC meyakini anggota parlemen memiliki peran kunci melawan korupsi. Terlebih dalam situasi merespon pandemi COVID-19.



Dr. Fadli Zon, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen
memberikan kata sambutan

Tantangan dalam pelaksanaan peran parlemen dalam masa krisis pasti ada. Namun, menurut Dr. Fadli Zon, peran parlemen untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah, melegislasi

kerangka aturan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dana publik dan korupsi, dan melindungi, membela, dan memastikan uang negara sampai kepada mereka yang paling membutuhkan adalah sebuah keniscayaan.

Information Webinar kali ini merupakan satu dari sekian sarana berjejaring SEAPAC yang dapat dilakukan dalam masa-masa sulit ini. Ia meyakini UNGASS akan menyediakan dorongan politik yang lebih kuat dalam gerakan anti-korupsi global, terlebih dalam situasi pandemi. Namun, kerap kali agenda internasional PBB hanya ada di ranah eksekutif. Sementara anggota parlemen, sebagai penerima mandat dan suara rakyat kerap ditinggal. SEAPAC meyakini, anggota parlemen harus tidak ditinggal. Melalui GOPAC, anggota parlemen telah berkontribusi dalam diskusi untuk UNGASS. Tetapi, semakin banyak anggota parlemen yang bergabung dalam diskusi, semakin banyak yang dapat dicapai.

H.E. Dr. (H.C.) Puan Maharani, Ketua DPR RI (*Video Message*)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani, menyampaikan, UNGASS 2021 menjadi peluang bagi anggota parlemen memberi dukungan terhadap komitmen global anti-korupsi. Saat ini dunia mengalami guncangan serius karena COVID-19.



Dr. (H.C.) Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI menyampaikan pesan melalui *video message*

Ketua DPR memberikan sedikitnya tiga usulan untuk melawan korupsi dalam masa pandemi. Pertama, upaya memperkuat pengawasan demi memastikan akuntabilitas pemerintahan dalam melaksanakan program terkait COVID-19. Yang kedua, memajukan transparansi dalam respon terkait COVID-19, seperti yang berkaitan dengan pengadaan publik. Yang ketiga adalah memperkuat tata kelola yang baik dalam sektor publik dan swasta untuk memperkuat integritas dalam merespon COVID-19.

2. SESI PRESENTASI PANELIS

Moderator: Mardani Ali Sera, tahun ini merupakan momentum bagi anggota parlemen untuk memperkuat Gerakan global anti-korupsi. Sebagaimana diketahui, PBB akan menyelenggarakan UN GA Special Session against Corruption (UNGASS) 2021. UNGASS akan membahas isu global anti-korupsi dan kerja sama internasional. Sebuah deklarasi politik yang ringkas dan berorientasi aksi akan diadopsi melalui proses negosiasi antarpemerintah.

Beberapa hari lalu, Transparency International (TI) merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2020 dengan hasil yang beragam. Situasi saat ini menunjukkan upaya pemberantasan perlu lebih kuat, seiring dengan situasi pandemi. Diskusi saat ini membuka peluang lanjutan untuk menyampaikan dimensi keparlemenan dan bagaimana anggota parlemen untuk berperan dalam UNGASS dan juga setelah UNGASS.



Dr. Mardani Ali Sera, Wakil Ketua BKSAP

Mr. Fransesco Checci, UNODC Regional Advisor for Anti-Corruption, **menyatakan** anggota parlemen sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di level nasional dan global. Ia menceritakan awal mula UNGASS direncanakan. Pada Desember 2018, Sidang Umum PBB memutuskan untuk menghelat UNGASS 2021. Jadwal saat ini telah berubah dari April ke 2-4 Juni 2021. Sejumlah resolusi tentang modalitas acara tersebut telah diadopsi.

Konferensi Negara Pihak (*Conference of States Parties/CoSP*) dalam UNCAC merupakan kunci dalam pengambilan kebijakan persiapan UNGASS 2021. CoSP akhirnya menunjuk dua co-fasilitator untuk proses UNGASS tersebut adalah *Ambassador* Erick Anderson Machado (Peru) dan *Ambassador* Hamad Al-Kaabi (UAE). UNODC memberikan dukungan untuk proses persiapan UNGASS baik substantif dan teknis.



Mr. Fransesco Checci, UNODC Regional Advisor for Anti-Corruption

Tiga pertemuan antar-sesi (*inter-sessional meetings*) diselenggarakan di Vienna untuk ruang diskusi dan pertukaran ide sebagai bagian dari proses persiapan UNGASS. Diskusi aktif berlangsung antara pemerintah, masyarakat sipil internasional, dan akademisi. Ada sejumlah ide-ide yang dihadirkan untuk hasil UNGASS.

Pertemuan tersebut biasanya memiliki fokus tematik dan diskusi panel yang sejalan dengan diskusi konsultasi formal. Isu-isu tematik di antaranya: pencegahan korupsi selama krisis dan

mengakhiri impunitas dengan secara efektif memerangi korupsi (pertemuan pertama, September 2020), pemulihan asset, dan kerja sama internasional (pertemuan kedua, pertengahan November 2020), isu pemilik manfaat (*beneficial ownership/BO*), *transparency*, dan peran swasta dalam pemberantasan korupsi, langkah menangani impunitas, pengawasan, independensi badan pengawas, dan pemanfaatan teknologi untuk upaya pemberantasan korupsi pada pertemuan ketiga, 22-23 Februari 2021. Dokumen-dokumen terkait tersedia di *website* www.ungass2021.org.

Hasil UNGASS adalah Deklarasi Politik. *Zero draft* dari deklarasi telah dibagikan kepada delegasi CoSP yang disiapkan oleh co-facilitator dan UNODC pada 17 Agustus 2020. Draf juga mendapatkan masukan dari negara pihak. CoSP akan menyelenggarakan sesi khusus untuk menyetujui rancangan Deklarasi Politik pada 7 Mei 2021 yang kemudian direkomendasikan ke Sekjen PBB dan diadopsi pada UNGASS 2021, Juni.

GOPAC sudah memasukkan dua kontribusi terkait hal tersebut, yakni penegasan dari pasifik dalam melibatkan parlemen dalam deliberasi UNGASS 2021. Kedua dalam hal yang lebih luas melibatkan peran parlemen, pentingnya badan anti-korupsi yang independen, dan kuat serta pelibatan publik. UNODC menyampaikan terima kasih atas submisi tersebut.

Submission dari berbagai masyarakat sipil dan akademisi mencakup berbagai isu: arsitektur hukum internasional anti-korupsi, aspek pencegahan (pembiayaan partai politik, transparansi, konflik kepentingan, *undue pressure for policy making*). Banyak dari submisi ini terkait pencegahan korupsi dan elemen ini penting bagi parlemen untuk menanganinya.

Selain itu, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan juga upaya mengakhiri imunitas juga masuk dalam submisi terkait. Beberapa submisi mengimbau perlindungan kepada aktor penting dalam pencegahan korupsi, pengungkapan dan pelaporan korupsi seperti (*special protection*): *whistleblower*, perlindungan jurnalis anti-korupsi.

Submisi juga ada yang terkait kerja sama internasional, pemulihan asset agar lebih efisien, dan tidak memberi hambatan termasuk saran untuk menggunakan, serta memperkuat kerangka legal regional, intra-regional, dan international. Memaksimalkan penggunaan *flexible instrument* seperti *no conviction-based confiscation* dan *simplification procedure to improve efficiency*.

Ada pula submisi dukungan teknis, berbagi informasi dan isu terkait lainnya seperti teknologi, gender, dan pengukuran. Isu lain ada yang inovatif dan menjangkau ke depan, seperti korupsi dalam pandemi dan penanganannya, mekanisme atau instrumen seperti *voluntary anti-corruption trust fund* untuk membiayai dukungan teknis kepada program atau lembaga untuk mengukur dampak penanganan anti-korupsi. PBB juga mengembangkan posisi umum, yakni UN Special Substantive Contribution to the UNGASS yang dikembangkan oleh UNODC, UN Department of Political Affairs dan UNDP (dokumen dapat diakses di: https://ungass2021.unodc.org/uploads/ungass2021/documents/session1/contributions/UN_Common_Position_to_Address_Global_Corruption_Towards_UNGASS2021.pdf).

Suhana binti Haji Sudin, Lembaga Anti-Korupsi Brunei, Perwakilan ASEAN Parties against Corruption (ASEAN-PAC) menjelaskan mengenai ASEAN-PAC yang berdiri sejak 15 Desember 2004 dengan pendiri Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Tujuan ASEAN-PAC adalah untuk membentuk dan memperkuat upaya kolaboratif melawan korupsi di kawasan.

ASEAN-PAC yang sebelumnya SEA-PAC menjadi entitas ASEAN pada 2017 dan pada 2019 berubah nama jadi ASEAN-PAC. Rencana ASEAN-PAC 2020-2022 telah diadopsi untuk mensukseskan pelaksanaan UNCAC dalam siklus putaran review kedua.



Ms. Suhana Binti H. Sudin, ASEAN-PAC

Dasar pembentukan ASEAN-PAC adalah mengintensifkan kerja sama dan dukungan kepada lembaga anti-korupsi. Ini sejalan dengan UNCAC yang menawarkan kerangka kuat dalam keterlibatan internasional. Bab IV UNCAC memperkenalkan detail kerja sama internasional dalam kasus kriminal seperti ekstradisi, kerja sama hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), pemindahan terpidana (*transfer of sentenced persons*), juga melingkupi kerja sama penegak hukum investigasi bersama, teknik khusus investigasi.

Menyadari hal tersebut, ASEAN-PAC telah mengadopsi Rencana Aksi 2020-2022 untuk mendukung pelaksanaan efektif UNCAC dan mendukung negara anggota yang sedang dalam proses *review*.

Hasil 8th CoSP di Abu Dhabi, 2019, ada resolusi untuk memajukan praktik baik (*Best Practice*) dalam hubungannya dengan peran parlemen nasional dan lembaga legislatif lainnya untuk pencegahan, dan pemberantasan korupsi dengan segala bentuknya. Resolusi mendorong negara pihak untuk mendorong kerja sama dan dialog dengan parlemen, memajukan pertukaran praktik cerdas terkait legislasi, *review*, dan pengawasan. Resolusi mendorong lebih jauh agar negara pihak untuk mengakui peran penting parlemen dalam memperkuat pelaksanaan UNCAC.

ASEAN-PAC menginformasikan tentang UNGASS, Juni 2021. Ini merupakan kesempatan penting untuk membentuk agenda anti-korupsi global ke depan. Proses negosiasi deklarasi politik tengah berlangsung dan setidaknya mencakup lima bab utama UNCAC. ASEAN-PAC akan meneruskan kolaborasi antar-anggota. Memperkuat kemampuan masing-masing dan juga *know how* dalam mekanisme inovatif untuk memastikan ASEAN-PAC selangkah di depan bagi pelaku korupsi. Organisasi tersebut juga akan mendukung pelaksanaan UNCAC dan Kelompok Kerja seperti ADB, OEC, Bank Dunia, dan lainnya.

Mr. Mochammad Hadiyana, Deputy Informasi dan Data, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkenalkan komitmen KPK terhadap dunia internasional. KPK saat ini punya tiga strategi, yakni pendidikan publik, pencegahan, dan pemberantasan.

KPK menginformasikan sejumlah komitmen global yang ada di dunia. Sebagai negara pihak United Nations Convention against Corruption (UNCAC) dan UN Transnational Organized Crimes (UNTOC), Indonesia berkomitmen untuk mendorong standar penerapan internasional,

berbagi praktik cerdas dan lainnya. Indonesia juga terlibat dalam APEC Anti-Corruption and Transparency Working Group, G20 Anti-Corruption Working Group, dan lainnya.

KPK menginformasikan Indonesia telah selesai mengikuti proses review pelaksanaan (*implementation review*) pertama dan kedua dari UNCAC. Hasil dari review tersebut adalah sedikitnya 53 rekomendasi dengan kategori 7 ditaati penuh, 19 ditaati sebagian, dan 25 belum ditaati, dan dua tidak akan ditaati karena tidak sesuai dengan sistem hukum Indonesia.

Dalam kategori rekomendasi yang belum ditaati ada sejumlah rekomendasi seperti yang terkait perubahan UU anti-korupsi, UU Bantuan Hukum Timbal Balik, UU Pidana hingga pembentukan UU Ekstradisi, Pemulihan Aset dan lainnya. Hal tersebut merupakan rekomendasi-rekomendasi penting yang memerlukan komitmen kuat dan upaya berkelanjutan dari Pemerintah Indonesia dan DPR RI.



Mr. Mochammad Hadiyana, Deputy Information and Data, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Hal ini berkaitan dengan isu-isu pelik seperti dalam bingkai UNCAC, Indonesia diharapkan dapat mengkriminalisasi penyuaapan pihak asing (*criminalization of foreign bribery*), pengayaan tidak sah (*illicit enrichment*), perdagangan pengaruh (*trading in influence*), dan korupsi di sektor swasta (*corruption in the private sector*).

Dalam UNGASS akan ada deklarasi politik yang merepresentasikan komitmen negara pihak memberantas korupsi. Parlemen, dalam hal ini, memiliki peran penting mendukung komitmen tersebut dengan meningkatkan dan memperkuat kerangka legal nasional untuk anti-korupsi, sejalan dengan kewajiban internasional dalam UNCAC.

3. *SESI DISKUSI*

Datuk Hasanuddin bin Mohd Yunus, GOPAC Malaysia menerangkan politisi dipercaya dengan akuntabilitas dan tanggung jawab, sebagai penyewa, bukan tuan tanah. Politisi memiliki tanggung jawab membangun bangsa untuk kemakmuran rakyatnya. Mereka tidak diperbolehkan memperkaya diri sendiri, terlebih melalui penyalahgunaan kekuasaan, mismanajemen dan korupsi. Politisi harus menjadi contoh dan berbuat nyata (*walk the talk*).

Politisi harus dapat dipercaya. Di Malaysia, pelanggaran atas kepercayaan, dapat dihadapkan dengan ancaman pidana penjara 20 tahun, denda, dan cambuk. Tetapi, sebagai politisi terlebih sebagai bagian dari pemerintahan, kepercayaan tidak hanya tidak boleh dilanggar, ia memiliki beban akhirat sebagai hukuman di neraka.



Datuk Hasanuddin bin Mohd Yunus, GOPAC Malaysia

Wakil Presiden SEAPAC tersebut juga mengurai ragamnya penyebab korupsi yang di sebagian negara berkaitan dengan kesulitan hidup, gaji rendah, dan pola pikir yang merugikan. Di kawasan lain penyebabnya bisa karena peluang, minimnya integritas, dan keserakahan. Anggota parlemen harus menjadi agen perubahan dalam mewujudkan negara bebas korupsi.

Di Malaysia, sektor yang rentan korupsi adalah politik, administrasi publik, pengadaan publik, hukum dan peradilan, penegakan hukum, dan entitas perusahaan. Malaysia telah mengembangkan Rencana Anti-Korupsi nasional yang holistik dan komprehensif untuk mencegah dan mengatasi risiko korupsi. Pemerintah telah meminta seluruh organisasi untuk mengembangkan rencana anti-korupsi berbasis resiko untuk mengidentifikasi, merencanakan strategi dan memitigasi risiko.

Sebagai anggota SEAPAC, adalah sebuah kekecewaan ketika melihat nilai dan ranking negara di kawasan dalam hal Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh Transparency International (TI). Suka tidak suka, realitas atau persepsi, kita perlu menerima hasil survei tersebut dan bekerja untuk meningkatkan nilai dan ranking. Hanya Singapura yang mencetak angka 85 dan berada di ranking 3, ranking tinggi. Selamat kepada Singapura untuk konsistensinya dan menjadi pencapai tinggi di IPK. Brunei adalah negara berikutnya dengan skor 60 dan berada di peringkat 35.

Mr. Ouk Damry, GOPAC Cambodia menerangkan jika Parlemen Kamboja memiliki komitmen kuat memerangi korupsi. Badan Anti-Korupsi Kamboja dibentuk atas UU Anti-Korupsi, yang disahkan 2010. Perdana Menteri Kamboja memberikan pedoman mengenai upaya memerangi korupsi, yakni sebagai upaya untuk membuat masyarakat tidak berharap pada korupsi, tidak dapat korupsi dan tidak berani korupsi.



Mr. Ouk Damry, GOPAC Cambodia

Ia menerangkan persetujuan UU Anti-Korupsi dilakukan berbasis pada UU Hukum Acara Pidana (*Code of Criminal Procedure*) tahun 2007 dan Hukum Pidana tahun 2009 dengan tujuan memajukan efektivitas segala layanan publik dan memperkuat tata kelola yang baik. Kebijakan dan program anti-korupsi jelas terinci pada Rencana Pembangunan Nasional yang disebut dalam Strategi Tahap I, II dan III yang mempertimbangkan tata kelola yang baik sebagai inti dan anti-korupsi sebagai salah satu prioritas.

Pada tahun 2020, Parlemen Kamboja mengesahkan UU baru, yakni UU Anti Pencucian Uang dan Memerangi Pembiayaan Terorisme (*Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism*).

Dalam pemberantasan korupsi, Parlemen Kamboja memiliki peran untuk menerima dan mengkaji aduan terkait korupsi dan memediasi atau mengintervensi otoritas terkait dan lembaga untuk menyelesaikan aduan dimaksud melalui Presiden Parlemen Kamboja (*President of the National Assembly*). Parlemen Kamboja melakukan riset terkait korupsi dengan segala bentuknya di berbagai sektor, dan menyampaikan surat kepada Menteri atau kepala lembaga publik untuk meminta penyediaan dokumen penting terkait tanggung jawab Komisi Investigasi dan Anti-Korupsi.

Dalam UU, Badan Anti-Korupsi memiliki kekuasaan khusus menyelidiki korupsi (Pasal 25), keistimewaan lembaga dalam investigasi (Pasal 27), kewenangan pembekuan aset individual (Pasal 28) hingga perlindungan kepada pengadu, saksi dan orang terkait. Terkait pejabat negara atau mereka yang ditunjuk melalui Keputusan Kerajaan, harus melaporkan aset setiap dua tahun. Pada kesempatan tersebut, Kamboja juga menyampaikan nama anggota GOPAC Board of Director masih dalam pertimbangan mengingat keterbatasan anggaran negara terkait kontribusi.



Perwakilan GOPAC Timor Leste

Joao Andre Avelino Correia, Direktur Eksekutif GOPAC Timor Leste menerangkan dalam konteks Timor Leste, mengatasi korupsi tidak sama dengan mengkriminalisasi korupsi. Ini lebih kepada pendidikan anti-korupsi. Terutama kepada para pemuda, sebagai generasi berikutnya. Mereka perlu lebih paham perannya sebagai pemimpin masa depan. GOPAC Timor Leste menyebarluaskan informasi dan isu mengenai korupsi kepada pemuda ke seluruh negeri. Mereka menggunakan pendekatan korupsi adalah virus, tidak hanya penindakan seperti KPK. Tetapi juga tugas oleh seluruh pemangku kepentingan. GOPAC Timor Leste fokus pada isu mendidik generasi muda untuk memahami dan melawan korupsi. GOPAC TL mengusulkan *civic education instead of punishing people*. Ia juga mengusulkan perlunya intervensi pendidikan korupsi dari para pemuka agama.

4. SESI TANYA JAWAB

Mr. Jesus Crispin Remulla, Vice Chairperson Good Government and Public Accountability Committee, The House of Representatives of the Phillipines, menerangkan DPR Filipina aktif dalam mendorong legislasi terkait anti-korupsi dan tata kelola yang baik. DPR mengambil peran aktif, dengan tidak hanya mengubah UU atau menetapkan UU, tetapi juga dengan menginvestigasi isu yang menarik minat publik dengan tujuan mencari pihak yang bertanggung jawab atas isu terkait.



Mr. Jesus Crispin Remulla, Vice Chairperson Good Government and Public Accountability Committee, The House of Representatives of the Phillipines

Filipina berkomitmen untuk melakukan sebaik mungkin pemberantasan korupsi. DPR Filipina mengungkapkan masih banyak yang harus dipelajari dalam hal tata kelola yang baik dari negara-negara anggota di kawasan.



Mr. Putu Supadma Rudana, Wakil Ketua BKSAP DPR RI

Mr. Putu Supadma Rudana, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, mengusulkan agar anggota parlemen dapat menjadi bagian Delegasi Nasional pada UNGASS 2021. Mr. Putu juga menanyakan kepada UNODC mengenai rencana organisasi untuk memastikan deklarasi UNGASS terlaksana. Apakah ia mengikat secara hukum dan lainnya?

5. SESI TANGGAPAN PANELIS

UNODC: Mr. Checci merespon pentingnya ASEAN-PAC untuk upaya pemberantasan korupsi. SEAPAC mungkin tempat terbaik untuk melanjutkan beberapa kebijakan yang ada dalam melawan korupsi. Parlemen bisa mengisi kesenjangan kebijakan yang diperlukan, seperti menindaklanjuti hasil *review* UNCAC.

Ada banyak elemen dalam kerangka aturan dan legal yang dapat ditindaklanjuti SEAPAC sebagai sebuah isu regional. Akses atas informasi dan lainnya, perlu dorongan kerangka aturan dan legal untuk membangun diskusi di level pengambil kebijakan.

Terkait Deklarasi UNGASS 2021, ia menyatakan bahwa tidak akan mengikat bagi para negara anggota. Mereka hanya elemen pengikat. Sebagai tindak lanjut mungkin ada resolusi-resolusi untuk dorong isu-isu di deklarasi. Juga dimungkinkan dalam UNGASS, kelompok-kelompok

negara memiliki komitmen untuk melaksanakan isu-isu tertentu, seperti *beneficial ownership/kepemilikan manfaat*, pemulihan dana untuk korban korupsi dan lainnya.

ASEAN-PAC: Brunei akan terus terlibat dalam ASEAN-PAC dan sebagai informasi ASEAN-PAC akan mengeliat pertemuannya pada tahun 2021 ini.

KPK: ada beberapa aspek yang mempengaruhi penurunan IPK 2020, termasuk lemahnya penegakan hukum. KPK menggarisbawahi pentingnya mengurangi rekomendasi review UNCAC yang ada melalui peran parlemen dalam kebijakan.



Para narasumber Webinar SEAPAC 2021

6. SESI PENUTUP

Dr. Zon menyampaikan terima kasih atas peran para peserta dan panelis serta *discussant*. Ia berterimakasih kepada UNODC yang telah mengelaborasi dengan detail mengenai UNGASS 2021, agenda, hasil akhir dan peluang yang dapat ditindaklanjuti dalam jangka panjang. SEAPAC berharap dapat menjalin kemitraan dengan UNODC ke depan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada KPK dan juga ASEAN-PAC atas partisipasi dan kontribusinya.

Ia berharap acara ini dapat menjadi bagian untuk merancang aktivitas lanjutan sebagai tindak lanjut dari webinar dan menyarankan untuk dapat menjadi delegasi nasional ke UNGASS, apabila memungkinkan untuk melakukan perjalanan.

Webinar ini merupakan titik awal untuk upaya ke depan dari SEAPAC, eksekutif dan anggota parlemen secara keseluruhan untuk aksi konkret melawan korupsi serta memajukan tata kelola yang baik.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

- Poin-poin substantif yang dihasilkan kegiatan ini dapat ditindaklanjuti sebagai rekomendasi tindak lanjut di pertemuan SEAPAC selanjutnya.
- Melihat antusiasme peserta dalam mengikuti acara ini, BKSAP diharapkan terus melakukan kegiatan serupa dengan melibatkan akademisi dan para pakar.
- BKSAP agar terus melakukan inovasi dalam format Web Seminar. Ke depannya diharapkan dapat terus mengangkat tema-tema spesifik yang dapat mendukung diplomasi BKSAP dalam sidang-sidang internasional untuk memperjuangkan Kepentingan Nasional Republik Indonesia.

IV. PENUTUP

A. ANGGARAN

Anggaran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan acara ini adalah Rp. 356.170.000

(Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran sebagai berikut:

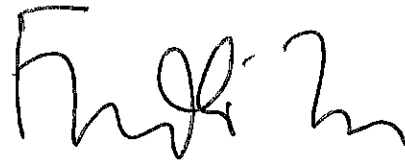
- *Paparan narasumber*
- *Dokumentasi*
- *Liputan media elektronik*
- *Kliping berita media cetak*

C. KATA PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Laporan Kunjungan Kerja SEAPAC *Information Seminar* pada tanggal 9 Februari 2021 di Bogor, Jawa Barat. Dokumen terkait akan dijadikan lampiran. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Februari 2021

Ketua Delegasi,



Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc.

A-86



Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen



Perwakilan SEAPAC memberikan tanggapan



Peserta webinar yang hadir secara virtual



Peserta webinar yang hadir secara virtual



**SEAPAC Chair, Dr. Fadli Zon,
Opening Remarks
SEAPAC Webinar**

UNGASS against Corruption 2021: What Roles are there for parliamentarians?

Honorable Vice Chairs and Distinguished Members of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation

Honorable Members of Parliament from SEAPAC member countries

Mr. Francesco Checchi, UNODC Regional Advisor on Anti-Corruption

Ms. Hajjah Suhana Binti Haji Sudin, Director of Brunei Darussalam Anti-Corruption Bureau, ASEAN-PAC Representative

Mr. Mochamad Hadiyana, Deputy for Information and Data, Indonesia Corruption Eradication Commission (KPK)

***Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen,***

***Assalamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,
Peace be upon us all,***

It gives me immense pleasure to welcome you all to this SEAPAC Information Webinar entitled “*The UNGASS against Corruption 2021: What Roles are there for parliamentarians?*” My apology to all SEAPAC Members for we cannot have any meeting or program implemented last year due to the COVID-19 pandemic and national restriction situation.

This year is no different I supposed... There is still a lot of uncertainty on what might happen regarding the pandemic, yet... we cannot stand for another excuse. Our network should deliver... as I believe that the success in the fight against corruption also depends on the way we work and collaborate in the region.

SEAPAC is a platform for us, parliamentarians, to work together, collaborate, and advocate means to combat corruption and promote good governance at the regional

level. As an international parliamentarian-network, we have the opportunity to bring together our best practices, experiences, and voices of our people and bring about a change in the way we combat corruption.

***Excellencies,
Honorable,
Distinguished Guests,***

SEAPAC believes that parliamentarians have the key roles to combat corruption through their constitutional parliamentary mandates. These roles are becoming of greater significance lately due to the COVID-19 pandemic responses.

I know that there are challenges in the exercise of our parliamentary duties during the emergency, but to hold the government to account, to legislate needed legal framework with adequate protection to prevent the misuse of public money and corruption... and... to safe, defend, and ensure that the public money delivered to those who are needed the most, are must-do jobs for a parliamentarian.

***Excellencies,
Honorable,
Distinguished Guests,***

Today's webinar is one of many means of networking that SEAPAC can exercise during this hard time. This year's activity will be started by a topical Information Webinar about an international event: the UN General Assembly Special Session against Corruption (UNGASS).

As agreed by the UN GA through a resolution 73/191, the UN will convene, in the first half of 2021, a General Assembly Special Session against Corruption. It will discuss challenges and measures to prevent and combat corruption and strengthen international cooperation.

I believe UNGASS provides a stronger political impetus for the global anti-corruption movement. It is critical as we for this past year have been dealing with massive delivery of public money and programs specifically designed to respond to the COVID-19 pandemic and recover from the resulting impact of such crisis.

But most of the time, many UN international agendas reserved only to the executives. While parliamentarians, as people who receive mandates and voices of the people are left behind.

SEAPAC believes that we should not leave anyone behind. Under GOPAC, we do have already contributed to the discussion for UNGASS. But we know that the more parliamentarians join the discussion... the more we can achieve. The more they know much about the UNGASS, the best we can prepare for actions beyond UNGASS.

***Excellencies,
Honorable,
Distinguished Guests,***

This Information Webinar is open for all parliaments and parliamentarians within the southeast Asia region. It is not exclusive only for GOPAC – SEAPAC Members, with the hope that after this webinar, you will have more insight on the agenda and set actions to follow up or to prepare priorities for the UNGASS.

I know that we still have much to do, but this is a small step for a greater one. I hope that the Webinar will be fruitful and deliberative. For those who have not yet a member, I encourage you, my fellow parliamentarians, to join GOPAC – SEAPAC membership.

Let us collaborate for a better region free from corruption.

Join us. Be our ally!

***Thank You.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***



Closing Remarks
Hon. Dr. Fadli Zon, MP,
Chair of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation
The House of Representatives of
the Republic of Indonesia

Assalamualaikum Wr, Wb.

Peace be upon us all,

Distinguished panellists and participants,

Ladies and Gentlemen,

Thank you all for your participation. It has been a lively and engaging discussion.

I believe this FGD has enriched our insight on the national green growth agenda and post COVID-19 recovery plan. It has also introduced us to the System of Environmental Economic Accounting, as well as enabled us to draw on the experiences of the Public Account Committee of the UK House of Commons. We have discussed the economic rationale of placing nature at the heart of post-pandemic recovery. We gain a better understanding on the nexus of natural capital assets and the economy.

Moving forward, the viable option is to move beyond romanticizing economic growth. Economies need to adopt a method that facilitates decision-making built upon all pillars of sustainable development and enable them to deliver the 2030 Agenda.

Implementation of green economy can only succeed with the supports of all sectors of society. Today we have set a momentum for parliamentarians and parliaments to work with academia, civil society and the public. Only by working together, parliamentarians could ensure people's concerns are heard and factored into decision making process.

The pandemic has slowing us down but it must not taking away our attention from the work at hand. We need to avoid the emergence and spread of pandemic as much as we need to maintain governance, accountability and transparency of public policies and resources during pandemic.

I wish you good health and all the best.

Thank you.



**Moderator's Note
SEAPAC Webinar
UNGASS against Corruption 2021: What Roles are there for
parliamentarians?**

Dr. Mardani Ali Sera

Assalamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

*Honorable Dr. Fadli Zon, Chair of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation of the House of Representatives of the Republic of Indonesia,
Honorable Mr. Francesco Checchi, UNODC Regional Advisor on Anti-Corruption*

Honorable Ms. Hajjah Suhana binti Haji Sudin, Director of Brunei Darussalam Anti-Corruption Bureau, ASEAN-PAC Representatives

Honorable Mr. Mochamad Hadiyana, Deputy Head of Indonesia Corruption Eradication Commission for Data and Information.

Honorable Indonesia Member of Parliaments,

Honorable Cambodia Member of Parliaments,

Honorable Malaysia Member of Parliaments,

Honorable the Philippines Member of Parliaments,

Honorable Timor-Leste Member of Parliaments,

Ladies and Gentlemen,

A very good morning to all of you,

Thank you for joining us this morning on the South East Asia Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) Webinar on “The UN General Assembly Special Session against corruption (UNGASS) 2021: What role are there for parliamentarians?” initiated by the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation of Indonesian House of Representatives and SEAPAC. My name is Mardani Ali Sera, Vice-Chairperson of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation of Indonesian House of Representatives as well as the Secretary of SEAPAC, and today I serve as moderator for this discussion.



Distinguished Delegates,

This year is a momentum for us, parliamentarians, to strengthen our commitment in raising awareness and work together in the anti-corruption global movement. As you may be aware, on 2-4 June 2021, the United Nations will hold the first general assembly focused on corruption, namely the UN General Assembly Special Session Against Corruption (UNGASS). The session will discuss challenges and measures to prevent and combat corruption, and strengthen international cooperation. At that special session, a concise and action-oriented political declaration will be adopted upon intergovernmental negotiations process under the auspices of the Conference of the State Parties to the UN Conventions against Corruption (UNCAC).

Last week, Transparency International just launched their 2020 Corruption Perception Index. The diverse results of anti-corruption measures that have been implemented in the region, can be seen through the index. Based on the Transparency International report, some countries experienced slow progress in anti-corruption efforts, while others steadily improved their integrity infrastructure. Certainly, more concrete action needs to be done to eliminate corruption in our region.

The UNGASS 2021 could be our platform and reference to strengthen South-East Asian Countries' commitment and to propose stronger anti-corruption measures that are currently critical for the region, especially in this pandemic time. The COVID-19 has created opportunities and risks of misuse and mismanagement in the relief mobilization resource.

Fellow Member of Parliaments,

We are fortunate that today we have Mr. Francesco Checchi with us to share his knowledge on the importance of UNGASS 2021 and on what role can parliamentarians do to support the UNGASS 2021 agenda. Mr. Checchi is UNODC Anti-Corruption Regional Adviser for South East Asia and has more than 15 years of experience working in international



organizations in the area of good governance, public administration reform, and anti-corruption. His work focuses on providing support to Member states of the UN Convention Against Corruption for implementation of the Convention. He received a BA in Political Sciences from the University of Pisa (Italy) and a Master's Degree from the Sorbonne University in Public Administration.

UNODC is the United Nations body mandated to focus and enhance its capacity to address corruption, the guardian of the UN Convention Against Corruption (UNCAC), and the organization who is responsible for the UN General Assembly Against Corruption. Therefore, I think it is best for us to hear directly from the UNODC about the preparation and the comprehensive idea of UNGASS and where parliamentarians can best fit plays their role in delivering parliamentary dimension to the UNGASS.

(read CV if necessary)

Before we proceed to the agenda of a panel discussion with Mr. Francesco, please kindly allow me to remind you that the time allocation for the presentation is **10 minutes**, and we will go to the questions and answer sessions after all the panelists deliver their presentation.

Now, without further ado, Mr. Francesco, the floor is yours.

(presentation)

Thank you Mr. Francesco for the clear explanation and insightful information.

Now, I give the floor to Ms. Hajjah Suhana Binti Haji Sudin, Director of Brunei Anti-Corruption Institution and ASEAN Parties against Corruption Representatives. Previously, she worked in the Attorney General's Chamber. She received Bachelor of Law from Middlesex University, Barrister at-law from at Lincoln's Inn, and Diploma Syariah Law and Practice from University Islam Sultan Sharif Ali.

(read CV if necessary)



We would like to hear the state of corruption in Southeast Asia and ASEAN-PAC focus during the 2021 UNGASS. Please, Ms. Suhana the floor is yours.

Thank you Ms. Suhana.

Now, it is time to hear from our last panelist of the day, the Indonesia Corruption Eradication Commission Deputy for Information and Data, Mr. Mochamad Hadiyana. Mr. Hadiyana graduated with a bachelor's degree in engineering physics from Bandung Institute of Technology, Indonesia, and with a master's degree in engineering from the School of Engineering, Vanderbilt University, USA. Before serving in KPK, he was Director of Standardization of Postal and ICT Equipment at the Ministry of Communication and Information Technology.

I hope we can hear some Indonesian perspectives. What are the KPK aspires for the UNGASS and how KPK will carry out the implementation of the political declaration. Mr. Hadiyana, the floor is yours.

Thank you Mr. Hadiyana.

We also would like to hear some thoughts from representatives of our national chapters before proceeding to questions and answers.

First, allow me to give the floor to Hon. Datuk Haji Hasanuddin bin Mohd Yunus, Malaysian Member of Parliament as well as SEAPAC Vice-Chair as the first discussant.

(discussant presentation from Hon. Mohd Yunus).

Thank you for these important thoughts, Hon. Hasanuddin. The second discussant is Hon. Ouk Damry, a representative from GOPAC Cambodia and Member of the Commission on the Investigation and Anti-Corruption, National Assembly of Cambodia. Please, Hon. Damry, the floor is yours



(discussant presentation from Hon. Ouk Damry)

Thank you, Hon. Damry. Our third discussant is from GOPAC Timor-Leste represented by Mrs. Maria Lourdes M. Bessa, the floor is yours.

(discussant presentation from Mrs. Bessa)

Thank you, Mrs. Bessa.

Now, I would like to allow fellow parliamentarians in the zoom to have the discussion with the panelists. Perhaps we can start with the Philippines, should you have any issue to raise? The Philippines, the floor is yours.

First..... Second..... Third.....

Thank you for your active participation and fruitful discussion in this webinar.

Through our dynamic conversation, we realize that addressing corruption is hardly done alone. We need to collaborate and cooperate so that the problem of corruption can be approached from various perspectives and produce more comprehensive solutions.

It is time for us to conclude this discussion. But before that we would like to hear some words from Dr. Zon to wrap up this discussion.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



**The South East Asia Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC)
Webinar**

**“The UN General Assembly Special Session against corruption (UNGASS) 2021:
What role are there for parliamentarians?”**

Bogor, 9 February 2021

Brief Remarks and Question to Response:
Enhancing role of parliamentarians in the UNGASS 2021

Prepared for Member of Parliament the House of Representatives of the Republic of Indonesia

*Honorable Chairperson of the Committee of the Inter Parliamentary Cooperation,
Distinguished panelists,
My fellow members of the parliament,
Ladies and gentlemen,*

I am pleased and honored to be here today. Thank you for the opportunity.

Corruption is indeed a complicated issue and hard to be dealt with only by one side. As a famous proverb says, “It takes two to tango.” Corrupt practices could continue because there are supply and demand who takes the opportunity to commit the acts of corruption for their own gain. We have to stop this. We have to continue to strengthen our cooperation to eliminate this extraordinary crime. Every stakeholder should foster collective action to ensure the success of anti-corruption measures.

The upcoming UN General Assembly Against Corruption is a great moment for us to raise our awareness and concern about corruption. It is an opportunity for like-minded organizations to gather and discuss so that corruption can be approached and resolved from multiple angles.

As lawmakers, we have an essential role in addressing corruption, such as setting up anti-corruption legislation, among others. Parliamentarians also have the responsibility to expose and denounce corruption and work in partnership with the government, anti-corruption institutions, and other relevant stakeholders. Therefore, parliaments should be engaged and included in the discussion of UNGASS 2021.



I hope that parliamentarians could be involved and become part of the national delegation for UNGASS 2021 together with the government. Parliament could raise the exposure, and ease the opportunities to follow up, within our parliamentary framework, all the issues that continuously evolve in the UNGASS.

In addition, I have questions for Mr. Francesco Checchi: After completion of the assembly, how would the UNGASS Political Declaration be implemented? And whether the declaration is binding to the States that have ratified the UNCAC. What are the UNODC plans to ensure all States enforce the declaration in their respective countries?

Thank you.



Fadli Zon: Parlemen Pegang Peranan Kunci Perangi Korupsi

10-02-2021 / B.K.S.A.P.



Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon (tengah) foto bersama usai Webinar SEAPAC di Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/2/2021). Foto : Ayu/Man

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon menilai korupsi menjadi salah satu sebab kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakmerataan terlebih lagi di masa pandemic Covid-19 ini. Atas dasar itulah Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) atau Parlemen Asia Tenggara Melawan Korupsi, Light

bekerja sama dengan beberapa lembaga anti korupsi di beberapa negara, menggelar webinar terkait bagaimana mengatasi korupsi dari sisi parlemen di Asia Tenggara.

“Parlemen dan anggota parlemen memegang peran kunci dalam memerangi korupsi. Parlemen adalah lembaga penting dalam memastikan pertanggungjawaban pemerintah dan membuat undang-undang yang diperlukan untuk pemberantasan korupsi. Anggota parlemen, sebagai figur parlemen, memiliki legitimasi untuk mengamankan, mempertahankan, dan menjaga dana publik sebagaimana diamanatkan oleh konstituen,” ujar Fadli usai Webinar SEAPAC di Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/2/2021).

Fadli yang juga sebagai Ketua SEAPAC ini meyakini bahwa suara parlemen sangat penting dalam membentuk lanskap nasional dan internasional. Parlemen membantu dan bahkan menjadi sumber kekuatan untuk mewujudkan bangsa yang bebas korupsi. Di arena internasional, anggota parlemen membangun jaringan dan memfasilitasi pertukaran informasi, pembelajaran dan menciptakan dampak untuk pengaturan anti-korupsi global.

Terlebih lagi bulan Juni mendatang Majelis Umum PBB akan menggelar Sidang Khusus Majelis Umum PBB melawan korupsi United Nations-General Assembly Special Session Against Corruption (UNGASS) 2021. Hal itu menurut Politisi Partai Gerindra ini menjadi kesempatan bagi SEAPAC untuk memperkuat kesadaran parlemen Negara-negara Asia Tenggara, tentang agenda global ke depan dalam konteks anti-korupsi dan tata pemerintahan yang baik.

Anggota Parlemen, lanjut Fadli, dapat memberikan perspektif parlementer yang bermanfaat untuk membentuk masa depan agenda anti korupsi global. Sebagai perwakilan rakyat, penerima manfaat utama dari kebijakan publik, para anggota parlemen dapat mengisi celah yang tidak diperkirakan oleh otoritas pemerintah dengan terlibat penuh, dalam proses dan pekerjaan keduanya, pada perumusan dan implementasi UNGASS 2021 mendatang.

“Dan webinar SEAPAC kali ini selain dapat dijadikan informasi tentang UNGASS 2021, juga diharapkan menyediakan platform di mana parlemen dan anggota parlemen dapat mengeksplorasi kemungkinan cara-cara dan langkah-langkah untuk memastikan implementasi yang efektif dari hasil keluaran UNGASS 2021: Deklarasi Politik,” tegasnya.

Usai webinar yang dimoderatori oleh Wakil Ketua BKSAP, Mardani Ali Sera itu, Fadli mengakui bahwa saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjadi salah satu lembaga anti korupsi yang dipercaya kredibilitasnya. Meski demikian tetap harus ada evaluasi dan control terhadap KPK, agar lembaga ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dijadikan alat politik. Sehingga tidak ada tebang-pilih dalam penanganan dan pemberantasan kasus korupsi. Dengan demikian KPK tetap menjalankan tugas-tugasnya baik pencegahan maupun penindakan korupsi di Negara ini.

(ayu/es)



© 2016 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Perangi Korupsi Tidak Sekedar Menghukum Tapi Juga Mendidik Pelaku

11-02-2021 / B.K.S.A.P.



Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera memoderatori Webinar South East Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) di Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/2/2021). Foto : Ayu/nvl

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menilai bahwa memerangi korupsi ini bukan sekedar menghukum para pelaku, melainkan juga bagaimana mendidik semua pihak untuk tidak ^{Light} melakukan dan mengulangi perbuatan tersebut.

"Saya sependapat dengan perwakilan dari Timor Leste, Fransesco Miranda yang mengatakan bahwa memerangi korupsi ini bukan sekedar menghukum, namun juga mendidik yang melibatkan pemimpin agama," ujar Mardani usai memoderatori Webinar South East Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) di Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/2/2021).

Dengan mendidik, khususnya melalui pendekatan agama, lanjut Mardani, diharapkan bisa menumbuhkan kembali moral seseorang untuk tidak kembali melakukan hal yang sama. Atau paling tidak, mencegah orang lain untuk tidak mencontoh atau melakukan hal serupa. Dengan kata lain setidaknya pola tersebut dapat mengurangi angka korupsi di Indonesia khususnya, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan, jika mengacu kepada laporan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari *International Transparency* (Transparansi Internasional) pergerakan memerangi korupsi di Indonesia juga negara-negara di kawasan ASEAN masih terbilang sangat lambat.

Pada tahun 2019, hanya tiga Negara Asia Tenggara yang mendapat skor di atas 50 (0 adalah yang paling korup sedangkan 100 adalah yang terbersih dalam IPK-red), yakni Brunei (60), Malaysia (53), dan Singapura (85). Dengan kata lain hanya Singapura di peringkat tiga, dan Brunei Darussalam di peringkat 30, sementara Indonesia di bawah kedua negara tetangga.

"Ini menjadi lampu kuning bagi kita semua untuk segera bergerak memberantas korupsi. Harus ada tindakan yang diambil. Terlebih lagi beberapa bulan mendatang akan digelar sesi khusus Majelis Umum PBB Melawan Korupsi (UNGASS) 2021. Apa peran yang dapat dimainkan oleh anggota parlemen? Atas dasar itulah webinar ini diselenggarakan," jelas politisi Fraksi PKS ini.

Sesi Khusus Sidang Umum PBB Melawan Korupsi (UNGASS) mendatang akan membahas tantangan-tantangan dan langkah-langkah untuk mencegah dan memberantas korupsi dan memperkuat kerjasama internasional. Ini akan menjadi momen penting untuk memberikan dorongan politik yang lebih kuat bagi gerakan antikorupsi global.

"Pada sesi khusus tersebut, sebuah deklarasi politik yang ringkas dan berorientasi pada tindakan akan diadopsi setelah proses negosiasi antar-pemerintah di bawah naungan Konferensi Negara-negara Pihak Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC)," pungkasnya. (ayu/es)



© 2016 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.